
Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Kampung dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kabupaten Merauke

Yosafat Fonataba¹, Esau Hombore², Ivone Agustina Nathan³, Simon Yanuaris Konorop⁴

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia^{1,2,3,4}

✉ Email Korespondensi: fonatabajosafat@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 16-06-2025

Disetujui 17-06-2025

Diterbitkan 20-06-2025

Katakunci:

Pemberdayaan

Masyarakat;

Peran Perempuan;

Peran Pemuda;

Perencanaan Partisipatif;

Pengawasan Desa

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan pemuda dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan desa, sekaligus menghasilkan model sederhana pemberdayaan kelompok rentan dalam tata kelola desa yang dapat direplikasi di wilayah perbatasan lainnya. Program ini dilaksanakan di Kampung Yanggandur, Kabupaten Merauke, menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan aparat pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, pemetaan pola partisipasi, penyusunan modul kontekstual, pelatihan teknis, workshop partisipasi masyarakat, pendampingan, serta evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparat dalam penyusunan laporan keuangan sederhana, penyampaian informasi anggaran secara terbuka, dan penggunaan media informasi publik seperti papan anggaran. Selain itu, partisipasi perempuan dan pemuda dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan desa meningkat secara signifikan. Program ini mendukung penerapan prinsip good governance pada tingkat desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Model pendampingan yang dikembangkan dinilai efektif dan relevan untuk direplikasi pada kampung-kampung perbatasan lainnya sebagai upaya memperkuat tata kelola desa berbasis partisipasi dan kearifan lokal.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fonataba, Y., Hombore, E. ., Nathan, I. A. ., & Konorop, S. Y. . (2025). Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Kampung dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kabupaten Merauke. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 353-364. <https://doi.org/10.63822/89fjfs49>

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perencanaan dan pengawasan pembangunan desa menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, dan akuntabel (Lathifah et al., 2024). Perencanaan yang baik mendorong partisipasi masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan, sementara pengawasan menjadi mekanisme kontrol untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan (Fauziah & Suantha, 2025). Dalam konteks kebijakan nasional, pemberdayaan masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan dan pemuda, menjadi salah satu fokus strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipasi (Tohawi, 2025). Kondisi khusus Kampung Yanggandur di Kabupaten Merauke mencerminkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Kampung Yanggandur menghadapi persoalan geografis, seperti keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Selain itu, keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat kampung menjadi potensi sekaligus tantangan dalam mengelola pembangunan yang inklusif. Perbedaan latar belakang budaya sering kali menimbulkan dinamika sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan. Di sisi lain, persoalan kesenjangan gender masih cukup nyata, di mana perempuan dan pemuda belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang proporsional dalam forum musyawarah desa maupun dalam kegiatan pengawasan pembangunan (Syahrudin, Jalal, et al., 2023).

Keterbatasan partisipasi perempuan dan pemuda dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa di Kampung Yanggandur perlu mendapatkan perhatian serius. Padahal, kedua kelompok ini memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Minimnya keterlibatan perempuan dan pemuda menyebabkan aspirasi serta kebutuhan spesifik mereka sering tidak terakomodasi dalam rencana pembangunan (Tambaip & Tjilen, 2023). Selain itu, lemahnya kapasitas dalam bidang administrasi, perencanaan, dan mekanisme pengawasan menyebabkan peran mereka cenderung simbolis dan tidak substantif. Oleh karena itu, upaya pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda di Kampung Yanggandur menjadi penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Berbagai studi yang dilakukan di kawasan perbatasan, termasuk di Papua, menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa masih sangat terbatas. Partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan Papua mengungkapkan bahwa keputusan pembangunan desa umumnya didominasi oleh aparat desa dan tokoh adat, sedangkan suara perempuan dan pemuda seringkali hanya menjadi pelengkap formal dalam musyawarah desa tanpa kontribusi yang bermakna (Syahrudin, Tambaip, et al., 2023). Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPPMD) Papua Selatan (2022) yang menyebutkan bahwa sebagian besar desa di kawasan perbatasan, termasuk Kampung Yanggandur, belum memiliki mekanisme yang sistematis untuk memastikan partisipasi kelompok rentan dalam siklus pembangunan desa.

Di sisi lain, hingga saat ini program pemberdayaan yang secara khusus menargetkan peningkatan kapasitas perempuan dan pemuda untuk memainkan peran strategis dalam perencanaan maupun pengawasan pembangunan desa masih sangat terbatas di Kampung Yanggandur. Sebagian besar program

yang ada berfokus pada aspek ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan atau pemberdayaan kelompok usaha, sementara aspek tata kelola desa belum menjadi prioritas. Akibatnya, perempuan dan pemuda seringkali belum memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri untuk terlibat aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan desa. Minimnya upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas kelompok rentan ini menghambat terwujudnya tata kelola pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan model pemberdayaan berbasis kolaborasi antara aparatur desa dan masyarakat yang secara khusus dirancang untuk mendorong keterlibatan perempuan dan pemuda dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, khususnya di wilayah strategis seperti Kampung Yanggandur yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Pembangunan desa yang efektif di wilayah perbatasan, seperti Kampung Yanggandur di Kabupaten Merauke, tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana pembangunan, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Perempuan dan pemuda sebagai kelompok strategis sering kali hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan. Padahal, keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan guna memperkuat peran perempuan dan pemuda dalam tata kelola pembangunan desa, sehingga tercipta tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan pengabdian ini mengedepankan kebaruan melalui integrasi pendekatan partisipatif dengan penguatan kapasitas lokal yang dirancang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Kampung Yanggandur. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan dan pemuda untuk mengembangkan kemampuan analisis, komunikasi, dan advokasi dalam perencanaan maupun pengawasan pembangunan desa. Selain itu, kegiatan ini mengembangkan model kolaborasi antara aparatur desa dan masyarakat yang dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) di wilayah perbatasan. Model ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan membangun kesadaran bersama akan pentingnya partisipasi setara dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan pemuda dalam perencanaan pembangunan desa, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pengawasan pembangunan desa, serta menghasilkan model sederhana pemberdayaan kelompok rentan dalam tata kelola desa yang dapat direplikasi di wilayah perbatasan lain.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan aparatur pemerintahan kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai upaya untuk mendorong terciptanya tata kelola dana desa yang lebih transparan dan partisipatif. Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi masalah dan pemetaan kondisi riil tata kelola dana desa di lokasi sasaran melalui observasi langsung serta wawancara dengan pemerintah kampung, BPK, tokoh masyarakat, dan kelompok sasaran lainnya. Observasi ini ditujukan untuk memahami secara faktual mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa yang telah berjalan, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali

kendala utama dalam praktik pengelolaan, termasuk hambatan dalam transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pemetaan pola partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan tata kelola dana desa, mulai dari musyawarah perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan pelaporan. Analisis ini tidak hanya menyoroti peran aktor utama seperti aparat desa dan BPK, tetapi juga memperhatikan sejauh mana kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk merancang intervensi pendampingan yang tepat dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat kampung perbatasan di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan awal, tim pengabdian kemudian menyusun modul dan bahan pendampingan sebagai perangkat utama dalam kegiatan edukasi dan pelatihan. Modul tersebut difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Penyusunan modul dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil aparat kampung dan masyarakat yang teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Modul dirancang sederhana, praktis, dan kontekstual sehingga dapat digunakan secara efektif oleh seluruh peserta kegiatan. Bahasa yang digunakan dalam modul disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat setempat, menghindari istilah teknis yang sulit dipahami, dan mengakomodasi kearifan lokal serta nilai-nilai budaya Merauke. Pendekatan ini dipilih agar materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga dapat diterima dengan baik dan mampu memotivasi peserta untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik sehari-hari.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan dan workshop yang dirancang sebagai wahana peningkatan kapasitas baik bagi aparat kampung maupun masyarakat. Pelatihan khusus diberikan kepada aparat kampung dengan fokus pada peningkatan kemampuan dalam mengelola anggaran secara transparan, menyusun laporan keuangan sederhana, dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, workshop partisipasi masyarakat ditujukan untuk melatih kelompok sasaran terutama perempuan, pemuda, dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) agar memiliki pemahaman dan keterampilan dalam terlibat aktif pada musyawarah perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan dana desa. Metode pelatihan dikemas secara interaktif melalui simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok kecil sehingga dapat mendorong peserta untuk mengidentifikasi permasalahan riil dan menemukan solusi yang aplikatif sesuai dengan kondisi kampung masing-masing. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas tata kelola dana desa yang berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke.

Tahap pendampingan dan monitoring menjadi inti dari upaya memastikan keberlanjutan praktik tata kelola dana desa yang transparan dan partisipatif. Pendampingan dilakukan secara intensif kepada aparat kampung untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi yang telah dipelajari pada tahap pelatihan. Salah satu bentuk konkret pendampingan adalah fasilitasi pembuatan dan pemasangan papan informasi anggaran di balai kampung, yang memuat rincian perencanaan, alokasi, dan penggunaan dana desa secara terbuka. Papan informasi ini diharapkan menjadi media komunikasi visual yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kampung terhadap transparansi. Selain itu, tim pengabdian juga memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah kampung partisipatif sebagai ruang dialog terbuka antara aparat pemerintah kampung dan masyarakat. Musyawarah ini dirancang untuk memperkuat mekanisme partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan, mulai

dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program. Monitoring dilaksanakan secara berkesinambungan melalui observasi langsung terhadap dinamika kegiatan di lapangan serta diskusi evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Observasi dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik transparansi dan partisipasi benar-benar diadopsi dalam tata kelola dana desa. Sementara itu, diskusi evaluasi menjadi forum refleksi bersama guna mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang perbaikan ke depan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian, tetapi juga sebagai upaya penguatan kapasitas kolektif masyarakat dan aparatur dalam menjaga akuntabilitas publik. Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi partisipatif yang dilaksanakan untuk menilai secara menyeluruh hasil pelaksanaan program dan tantangan implementasi di tingkat kampung. Evaluasi ini melibatkan aparatur kampung, BPK, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya sehingga seluruh pihak memiliki ruang untuk memberikan masukan secara konstruktif. Berdasarkan hasil evaluasi, tim pengabdian kemudian menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola dana desa. Rekomendasi ini mencakup aspek teknis maupun strategis yang dirancang sesuai dengan kondisi lokal, dan diserahkan kepada pemerintah kampung serta pihak-pihak terkait sebagai bahan rujukan untuk penguatan tata kelola dana desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya transparansi dan partisipasi di kampung-kampung wilayah perbatasan Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Yanggandur, Kabupaten Merauke, dengan fokus pada pendampingan aparatur kampung dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan dan partisipatif. Selama pelaksanaan, pendekatan partisipatif digunakan untuk memastikan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh adat, terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Berbagai metode seperti pelatihan, workshop, simulasi, dan pendampingan langsung diterapkan agar capaian program tidak hanya berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi juga diikuti dengan praktik nyata di tingkat kampung. Hasil dari kegiatan ini menggambarkan perubahan positif dalam tata kelola dana desa di Kampung Yanggandur.

Tabel 1. Hasil Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung Yanggandur dalam Tata Kelola Dana Desa

Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Keterangan Perubahan
Pemahaman penyusunan laporan dana desa	40	85	Peningkatan signifikan setelah pelatihan dan simulasi
Kemampuan menyusun papan informasi anggaran	25	80	Aparatur mampu merancang dan menampilkan informasi secara mandiri
Kesepakatan internal untuk transparansi	Tidak ada	Ada (100%)	Disepakati rutin membuat papan informasi anggaran setiap triwulan

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan signifikan kapasitas aparatur Kampung Yanggandur setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pemahaman aparatur dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa meningkat dari 40% sebelum kegiatan menjadi 85% setelah pelatihan dan simulasi. Kemampuan menyusun dan menampilkan papan informasi anggaran juga mengalami lonjakan dari 25% menjadi 80%, mencerminkan hasil nyata dari pendampingan praktis. Selain itu, seluruh aparatur berhasil mencapai kesepakatan internal untuk secara rutin menyusun papan informasi anggaran setiap triwulan, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Temuan ini mengindikasikan keberhasilan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal dalam meningkatkan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung Yanggandur

Kelompok Masyarakat	Jumlah Peserta Sebelum Kegiatan (Orang)	Jumlah Peserta Setelah Kegiatan (Orang)
Aparatur Kampung	7	7
Tokoh Adat	3	4
Perempuan (Mama-mama Kampung)	2	9
Pemuda Kampung	1	6
Warga Lainnya	10	12

Data hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat Kampung Yanggandur dalam musyawarah perencanaan pembangunan setelah dilakukan pendampingan. Kelompok perempuan (mama-mama kampung) yang sebelumnya hanya diwakili 2 orang meningkat menjadi 9 orang, sedangkan pemuda kampung bertambah dari 1 menjadi 6 orang. Tokoh adat juga mengalami peningkatan keterlibatan dari 3 menjadi 4 orang. Aparatur kampung tetap stabil dengan 7 peserta, sementara warga lainnya meningkat dari 10 menjadi 12 orang. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kegiatan dalam mendorong partisipasi kelompok yang sebelumnya kurang terlibat, terutama perempuan dan pemuda, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Tabel 3. Penerapan Praktik Transparansi di Kampung Yanggandur setelah Kegiatan Pendampingan

Bentuk Praktik Transparansi	Sebelum Pendampingan (Kondisi Awal)	Setelah Pendampingan (Hasil Kegiatan)	Keterangan
Pemasangan papan informasi dana desa	Tidak tersedia papan informasi, masyarakat tidak mengetahui detail anggaran	Papan informasi anggaran dipasang di balai kampung, diperbarui setiap triwulan	Sudah berjalan untuk laporan dana desa tahap I dan II
Pertemuan terbuka realisasi dana desa	Tidak ada pertemuan terbuka khusus untuk dana desa, informasi terbatas pada perangkat kampung	Pertemuan terbuka dilakukan setiap akhir triwulan untuk menyampaikan penggunaan dana dan rencana pembangunan	Diikuti >70% tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan
Forum dialog	Belum ada forum khusus,	Forum dialog rutin terbentuk,	Forum sudah

masyarakat untuk pengawasan	pengawasan informal dan sporadis	difasilitasi BPK, tokoh adat dan warga untuk menampung aspirasi dan laporan pengawasan	berjalan dua kali pascapendampingan
-----------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------

Tabel 3 menunjukkan perubahan nyata dalam penerapan praktik transparansi di Kampung Yanggandur setelah kegiatan pendampingan. Sebelum pendampingan, tidak tersedia papan informasi dana desa, tidak ada pertemuan terbuka khusus, dan forum pengawasan masyarakat belum terbentuk. Setelah pendampingan, pemerintah kampung mulai memasang papan informasi anggaran di balai kampung yang diperbarui setiap triwulan, melaksanakan pertemuan terbuka untuk menyampaikan realisasi dana desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat (lebih dari 70% peserta berasal dari tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda), serta membentuk forum dialog rutin sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengawasan yang sudah aktif berjalan dua kali. Perubahan ini mencerminkan peningkatan transparansi dan partisipasi warga dalam tata kelola dana desa.

Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman praktis aparatur Kampung Yanggandur dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola informasi publik terkait dana desa. Melalui pendekatan berbasis partisipasi dan studi kasus nyata, aparatur memperoleh pengetahuan langsung tentang format penyusunan laporan, mekanisme publikasi informasi anggaran, serta teknik komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Simulasi pembuatan laporan sederhana yang dilakukan bersama aparatur memudahkan mereka dalam mempraktikkan prinsip transparansi tanpa bergantung pada sistem yang kompleks (Prabowo et al., 2022). Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik kampung perbatasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi informasi. Sebelum pelaksanaan program pendampingan, praktik penyampaian informasi terkait dana desa di Kampung Yanggandur cenderung bersifat tertutup dan tidak sistematis. Informasi anggaran umumnya hanya diketahui oleh kalangan aparatur inti tanpa adanya penyampaian secara terbuka kepada masyarakat luas (Fatchuriza & Prasajo, 2021). Forum musyawarah kampung lebih sering bersifat formalitas, sehingga aspirasi dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana desa sangat minim. Namun, pasca pendampingan, terlihat perubahan positif pada perilaku aparatur dalam menyampaikan informasi dana desa. Aparatur mulai secara aktif memanfaatkan papan informasi anggaran yang dipasang di balai kampung, serta menginisiasi dialog terbuka dalam forum musyawarah untuk memaparkan rencana dan realisasi penggunaan dana desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa intervensi melalui pelatihan dan pendampingan mampu menumbuhkan kesadaran baru terkait pentingnya transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik (Istifadhoh & Rolianah, 2025).

Keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang ada di Kampung Yanggandur. Komitmen aparatur kampung, terutama kepala kampung dan sekretaris kampung, menjadi faktor kunci yang mendorong keberlanjutan praktik transparansi. Selain itu, peran tokoh adat sebagai penengah dan penggerak partisipasi masyarakat turut memperkuat upaya membangun tata kelola dana desa yang terbuka. Kehadiran tokoh adat dalam setiap musyawarah mampu menjembatani komunikasi antara aparatur dan warga, sehingga mendorong terciptanya suasana musyawarah yang lebih egaliter (Tjilen et al., 2023). Di sisi lain, kegiatan ini juga menghadapi beberapa faktor penghambat. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal kemampuan teknis pembuatan laporan keuangan

yang sesuai standar administrasi, masih menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, minimnya fasilitas informasi, seperti perangkat komputer dan akses internet, membatasi optimalisasi digitalisasi informasi publik (Tambaip et al., 2023). Faktor geografis berupa jarak antarpemukiman juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh warga secara merata dalam penyebarluasan informasi. Oleh karena itu, upaya-upaya lanjutan diperlukan, seperti penguatan pendampingan teknis dan penyediaan infrastruktur sederhana yang mendukung tata kelola informasi dana desa.

Pelaksanaan program pendampingan di Kampung Yanggandur memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, dalam forum musyawarah kampung. Sebelum program ini dijalankan, keterlibatan kedua kelompok tersebut dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa relatif rendah dan sering kali hanya bersifat simbolis (Bagaskara & Ma'ruf, 2025). Perempuan, yang selama ini lebih banyak berperan dalam lingkup domestik, jarang hadir dalam forum musyawarah, sedangkan pemuda umumnya bersikap pasif dan merasa tidak memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan (Peribadi et al., 2025). Namun, setelah pelaksanaan pelatihan dan simulasi musyawarah partisipatif, terjadi perubahan yang signifikan. Perempuan dan pemuda mulai aktif menyuarakan pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan desa, serta terlibat dalam penyusunan prioritas program pembangunan dan pengawasan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan keberanian berbicara mampu mengubah pola peran kelompok rentan dalam tata kelola pembangunan desa (Setyowati et al., 2022).

Metode partisipatif yang diterapkan dalam program ini juga berhasil membuka ruang dialog yang lebih setara antara pemerintah kampung dan warga. Penggunaan teknik fasilitasi seperti diskusi kelompok kecil, studi kasus berbasis persoalan nyata kampung, dan simulasi musyawarah mendorong terjadinya komunikasi dua arah yang konstruktif. Forum musyawarah yang sebelumnya kaku dan didominasi oleh aparatur kampung berubah menjadi ruang dialog terbuka yang memberikan kesempatan kepada setiap unsur masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, maupun masukan. Tokoh adat dan agama juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan diskusi sehingga suasana musyawarah tetap kondusif (Albab et al., 2024). Praktik ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip good governance di tingkat lokal, khususnya dalam hal partisipasi dan responsivitas pemerintah kampung terhadap aspirasi masyarakat (Tjilen et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi optimalisasi partisipasi masyarakat. Budaya malu, terutama di kalangan perempuan dan pemuda, masih menjadi hambatan dalam menyampaikan pendapat secara terbuka. Hal ini terkait dengan norma sosial yang menganggap forum musyawarah sebagai domain para tokoh senior dan aparatur desa. Selain itu, faktor geografis Kampung Yanggandur yang memiliki permukiman tersebar dan akses jalan yang terbatas juga menyulitkan sebagian warga untuk hadir dalam musyawarah kampung secara rutin (Ramdhon, 2021). Upaya untuk mengatasi tantangan ini dilakukan melalui pendekatan bertahap, misalnya dengan mengadakan forum musyawarah di beberapa titik pemukiman yang lebih dekat dengan warga, serta memberikan pendampingan khusus kepada kelompok perempuan dan pemuda untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam forum publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya partisipasi di Kampung Yanggandur secara berkelanjutan, sekaligus menjadi model yang dapat direplikasi di kampung-kampung perbatasan lainnya di Merauke.

Penerapan papan informasi anggaran dan forum dialog terbuka di Kampung Yanggandur terbukti menjadi langkah konkret dalam mendorong praktik transparansi tata kelola dana desa. Papan informasi yang dipasang di balai kampung memuat rincian alokasi dan realisasi anggaran dana desa secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut diperbarui secara berkala sesuai perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Selain itu, forum dialog terbuka yang difasilitasi secara berkala memungkinkan warga untuk mendapatkan penjelasan langsung dari aparat kampung terkait penggunaan dana desa serta menyampaikan kritik atau saran (Mandyartha et al., 2024). Keberadaan kedua sarana ini tidak hanya meningkatkan akses informasi publik, tetapi juga memperkuat hubungan komunikasi antara aparat dan masyarakat, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan kampung.

Keberhasilan praktik ini sangat relevan dengan karakteristik lokal Kampung Yanggandur yang menjunjung tinggi budaya gotong royong dan peran penting tokoh adat dalam kehidupan sosial. Budaya gotong royong tercermin dalam semangat kolektif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan fisik kampung maupun dalam menjaga keberlanjutan forum dialog yang difasilitasi. Papan informasi anggaran dan musyawarah terbuka menjadi sarana yang mendukung nilai-nilai kebersamaan tersebut, karena memberikan ruang bagi warga untuk berkontribusi tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga ide dan pengawasan. Peran tokoh adat sebagai penyeimbang dalam forum dialog turut menjaga agar diskusi berlangsung dalam suasana saling menghargai, tanpa menimbulkan konflik antarwarga atau antara warga dan aparat kampung (Nasution, 2024). Dengan demikian, praktik transparansi ini tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga kontekstual sesuai dengan struktur sosial-budaya setempat.

Potensi replikasi praktik transparansi berbasis papan informasi dan forum dialog terbuka di kampung-kampung perbatasan lainnya di Kabupaten Merauke cukup besar, mengingat karakteristik sosial masyarakat perbatasan umumnya serupa, yakni mengutamakan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap peran adat. Praktik ini dapat menjadi model sederhana namun efektif yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola dana desa di wilayah perbatasan. Tentu, replikasi tersebut memerlukan penyesuaian dengan kondisi spesifik masing-masing kampung, termasuk kesiapan aparat desa, dukungan tokoh adat, dan ketersediaan fasilitas informasi dasar. Oleh karena itu, sinergi antara pendampingan teknis, penguatan kapasitas lokal, dan kebijakan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas penerapan model transparansi ini di wilayah perbatasan lainnya (Hombone, 2025).

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Yanggandur menunjukkan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berbasis prinsip *good governance*. Praktik transparansi, melalui penggunaan papan informasi anggaran dan penyelenggaraan forum dialog terbuka, menjadi bentuk implementasi prinsip keterbukaan informasi publik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dana desa, tetapi juga memicu lahirnya kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal akuntabilitas, aparat kampung mulai terbiasa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara langsung di hadapan warga melalui forum musyawarah, sebuah perubahan yang signifikan dibanding kondisi sebelum pendampingan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kelompok perempuan dan pemuda, dalam musyawarah kampung menunjukkan keberhasilan intervensi program dalam mendorong pelibatan warga secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Seluruh dinamika ini menjadi bukti bahwa penguatan tata kelola desa yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif dapat diwujudkan melalui strategi pendampingan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga memiliki implikasi strategis terhadap upaya pemerintah dalam membangun desa perbatasan sebagai garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wilayah perbatasan yang memiliki posisi geo-strategis, Kampung Yanggandur dan desa-desa sejenis di Kabupaten Merauke memerlukan tata kelola pemerintahan yang kuat agar mampu menjadi benteng sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat tidak hanya berdampak pada tata kelola dana desa, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga terhadap pembangunan desa. Forum dialog terbuka yang rutin diselenggarakan, misalnya, bukan hanya menjadi sarana penyampaian informasi anggaran, tetapi juga media penguatan kohesi sosial dan nasionalisme di kawasan perbatasan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa perbatasan sebagai prioritas dalam upaya pemerataan pembangunan dan penjangkauan kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Yanggandur, Kabupaten Merauke, membuktikan bahwa pendampingan berbasis partisipatif mampu meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Aparatur kampung menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan sederhana, penyajian informasi anggaran secara terbuka, serta implementasi media informasi publik berupa papan anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, program ini berhasil memperkuat partisipasi masyarakat, terutama kelompok perempuan dan pemuda, dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan kampung. Peningkatan partisipasi ini tercermin dari keterlibatan aktif warga dalam musyawarah kampung, dialog publik, serta inisiatif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang menggabungkan pelatihan teknis, simulasi, dan dialog terbuka efektif dalam mendorong tata kelola yang inklusif di wilayah perbatasan. Secara konseptual, hasil kegiatan ini mendukung teori good governance pada tingkat desa, khususnya dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai landasan tata kelola pemerintahan desa yang responsif. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis konteks lokal dan kearifan budaya setempat merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola desa yang berkelanjutan di kawasan perbatasan. Dengan demikian, model pendampingan ini layak direkomendasikan untuk direplikasi pada kampung-kampung perbatasan lainnya di Merauke maupun kawasan perbatasan nasional lainnya sebagai upaya memperkuat posisi desa dalam pembangunan nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan masyarakat Kampung Yanggandur atas kerja sama, partisipasi, dan antusiasme yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada

STISIPOL Yaleka Maro Merauke atas dukungan, kolaborasi, dan kontribusi yang memungkinkan program ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, U., Ahadiyah, W., & Ariska, M. (2024). Upaya Modin Desa Dalam Memberikan Pendidikan Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Di Desa Jatirejo. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 865–876.
- Bagaskara, A., & Ma'ruf, M. F. (2025). Analisis Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024 (Studi Kasus Partisipasi Perempuan Sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Fatchuriza, M., & Prasojo, T. A. (2021). Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 45–53.
- Fauziah, S., & Suantha, K. K. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasirpogor. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 725–735.
- Hombone, E. (2025). Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 122–131.
- Istifadhoh, N., & Rolianah, W. S. (2025). Pendampingan Akuntansi SAK ETAP untuk BumPes Pesantren Robothotul Ashfiya'Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah, Gresik. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 6(2), 93–103.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Mandiyartha, E. P., Puspaningrum, E. Y., & Akbar, F. A. (2024). *Membangun Ekosistem Digital Pertanian: Solusi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Nasution, K. U. U. (2024). Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal. *Islamic Circle*, 5(1), 94–118.
- Peribadi, P., Arsyad, M., Tuwu, D., Asriani, A., Roslan, S., & Supiyah, R. (2025). *Kapita Selekta Pemiskinan dan Kemiskinan*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). *Inovasi pelayanan pada organisasi publik*. CV Remaja Rosdakarya.
- Ramdhon, A. (2021). *Srawung kampung-kota: kontestasi kampung diruhnya perubahan kota*. Pandiva Buku.
- Setyowati, Y., Giawa, A., & Marina, R. (2022). Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(1).
- Syahrudin, S., Jalal, N., Nahumury, M. A. I., Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3), 576–586.
- Syahrudin, S., Tambaip, B., Tjilen, A. P., Riyanto, P., Jalal, N., Moento, P. A., Prasetya, M. N., & Enala, S. H. (2023). Membangun Karakter Positif dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Merauke. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 95–105.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(02), 410–420.

-
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Dharmawan, B., Adrianus, A., Riyanto, P., & Ohoiwutun, Y. (2024). Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(1), 144–154. <https://doi.org/10.22495/cgobrv8i1p12>
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120.